



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN**

JALAN IR. SOEKARNO NOMOR 3, DESA PATUNO, KECAMATAN WANGI-WANGI,
KABUPATEN WAKATOBİ, SULAWESI TENGGARA

LAMAN : www.kkp.go.id SUREL : lptk.wakatobi@gmail.com

Nomor : B.28/LPTK/RC.610/I/2026
Sifat : Biasa
Lapiran : Satu Berkas
Hal : Laporan Kinerja LPTK Tahun 2025

20 Januari 2025

Yth. Sekretaris BPPSDMKP
di Jakarta

Sehubungan dengan Nota Dinas Sekretaris BPPSDM Nomor B.4095/BPPSDM.1/RC.610/XII/2025 Tanggal 8 Desember 2025 mengenai Penyampain Jadwal Pengukuran dan Pelaporan Tahun 2025, Bersama ini kami kirimkan dokumen Laporan Kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Tahun 2025.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Loka Perekayasaan
Teknologi Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Aliruddin



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025

LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

TIM PENYUSUN :

Penanggung Jawab : **Aliruddin, ST**
Plt. Kepala Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan

Ketua : **M. Ahda Rifqi Hanief, S.Pi**
Perencana/ Katimja Dukungan Manajerial

Anggota : **Amrin Hakim, S.Pi**
Pengelola Monitoring dan Evaluasi

Kontributor : Seluruh anggota tim kerja LPTK

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan

Alamat: Jl. Ir. Soekarno nomor 03. Wakatobi
Sulawesi Tenggara
e-mail : lptk.wakatobi@gmail.com



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia-Nya memberikan inspirasi dan semangat untuk menyelesaikan Laporan Kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Tahun 2025. Laporan ini merupakan hasil pelaksanaan kegiatan DIPA Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan pada periode Tahun Anggaran 2025 dengan metode penyajian mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi.

Pengelolaan kinerja sebagaimana pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023 terdiri atas a) perjenjangan kinerja; b) perencanaan Kinerja; c) pengukuran Kinerja; d) pelaporan Kinerja; dan e) evaluasi Kinerja. Laporan Kinerja Tahun 2025 ini merupakan bagian dari pelaporan Kinerja tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengelolaan kinerja. Setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja berkewajiban menyelenggarakan SAKIP dan pelaksanaannya disusun dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj). LKj merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan a) rencana strategis; b) perjanjian Kinerja; c) pengukuran Kinerja; d) pengelolaan data Kinerja; e) pelaporan Kinerja; dan f) reviu dan evaluasi Kinerja. LKj juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (good governance) dapat diwujudkan.

Laporan Kinerja ini memberikan informasi kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan yang terukur atas capaian pada periode Tahun 2025 dan menjadi bahan perbaikan bagi Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya pada periode berikutnya. Kinerja Loka Perekayasaan Teknologi diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Kegiatan (IK) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Tahun 2025 yang merupakan kontrak kinerja tahunan.

Akhirnya, dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kontribusi dari pihak yang turut mendukung penyusunan laporan kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan ini, laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada periode tahun berikutnya, walaupun masih terdapat kekurangan dalam penyajian dan sistematika penyusunannya. Semoga Allah SWT berkenan memberikan perlindungan dan ridho-Nya atas semua upaya yang dilakukan.

Wakatobi, 20 Januari 2025

Plt. Kepala LPTK,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Aliruddin, ST



DAFTAR ISI

	Halaman
Tim Penyusun	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	x
Ringkasan Eksekutif	xi
BAB. I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Tujuan	2
1.3. Tugas dan Fungsi	3
1.4. Keragaan Sumber Daya Manusia (SDM)	5
1.5. Sistematika Laporan	6
1.6. Potensi dan Permasalahan	7
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	8
2.1. Target Kinerja 2025-2029	9
2.2. Rencana Kerja Tahun 2025	10
2.3. Perjanjian Kinerja (PK)	11
2.4. Pengukuran Kinerja	12
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	14
3.1. Prestasi Indikator Kinerja Tahun 2025	15
3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja	16
3.3. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2025	28
3.4. Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumberdaya	32
3.4. Kegiatan Positif Lainnya	35
BAB IV. PENUTUP	36
4.1. Simpulan Capaian Kinerja Organisasi.....	37
Lampiran	38
- Perjanjian Kinerja	

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Target Kinerja LPTK Tahun 2025-2029	9
2. Rencana Kerja LPTK Tahun 2025	10
3. Perjanjian Kinerja LPTK Tahun 2025	11
4. Target dan Capaian Kinerja LPTK Tahun 2025	16
5. Capaian Kinerja IK 1 pada Tahun 2025	17
6. Capaian Kinerja IK 2 pada Tahun 2025	18
7. Capaian Kinerja IK 3 pada Tahun 2025	19
8. Capaian Kinerja IK 4 pada Tahun 2025	21
9. Capaian Kinerja IK 5 pada Tahun 2025	22
10. Capaian Kinerja IK 6 pada Tahun 2025	23
11. Capaian Kinerja IK 7 pada Tahun 2025	24
12. Capaian Kinerja IK 8 pada Tahun 2025	25
13. Capaian Kinerja IK 9 pada Tahun 2025	26
14. Capaian Kinerja IK 10 pada Tahun 2025	28
15. Histori Pagu Anggaran DIPA 2025	29
16. Pagu dan Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2025	29
17. Perbandingan Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2023-2025	29
18. Pagu dan Realisasi Anggaran per Rincian Output Tahun 2025	30
19. Pagu dan Realisasi Anggaran per IK Tahun 2025	31
20. Capaian Efisiensi Anggaran LPTK Tahun 2025	34

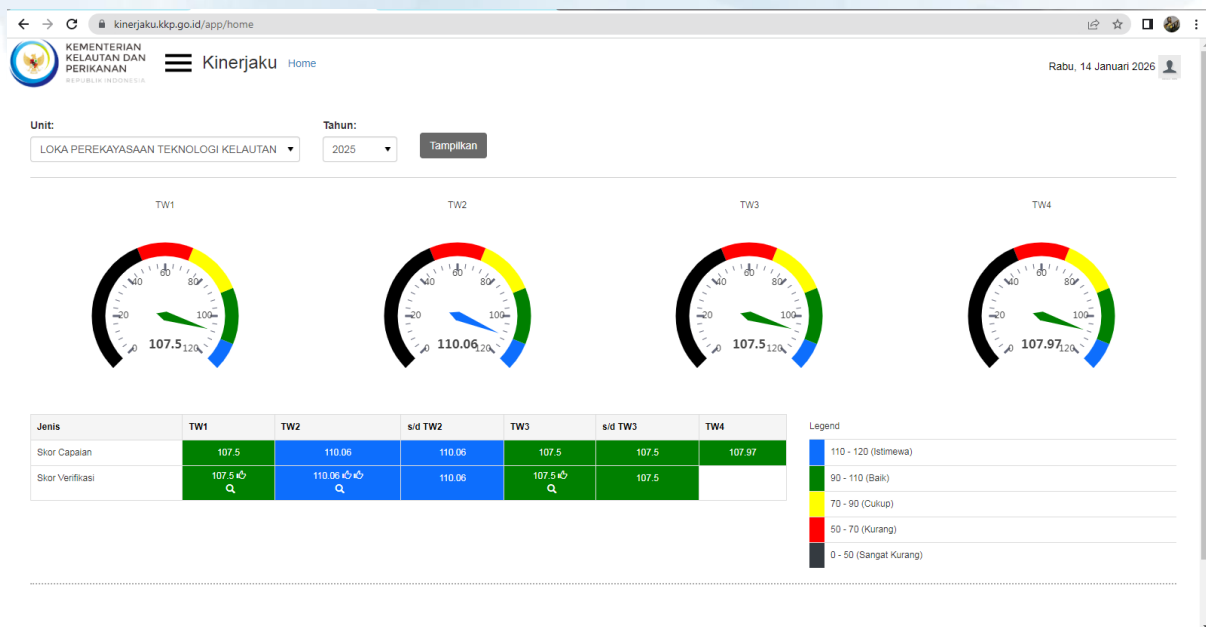
DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Dashboard Capaian Kinerja LPTK Tahun 2025	vii
2. Struktur Organisasi Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan	3
3. Komposisi SDM Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan	4
4. Rincian ASN Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan	5
5. Status Indeks Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	13
6. Dashboard Kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Tahun 2025	15
7. Sosialisasi Materi Kelautan dan Perikanan kepada Pelajar	35
8. Kunjungan Tamu ke LPTK	36
9. Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik LPTK	37
10. Penyelenggaraan Kegiatan Humas Lainnya	37

RINGKASAN EKSEKUTIF

Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (LPTK) sebagai Unit Pelaksana Teknis *eks-riset* dibawah koordinasi Sekretariat Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang kini menjalankan tugas dan fungsi manajerial dan masih memberikan layanan berupa sosialisasi dan diseminasi hasil riset yang telah dilakukan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan KKP, LPTK menyusun Laporan Kinerja interim dan tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2025 telah ditetapkan Perjanjian Kinerja (PK) antara LPTK dengan Sekretariat BPPSDMKP yang memuat 1 (*satu*) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 10 (*sepuluh*) Indikator Kinerja (IK) dengan dukungan anggaran sebesar Rp.3.188.726.000,- guna mencapai target-target yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja LPTK Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *logical frame work* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada laman <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja dengan menggunakan aplikasi Kinerjaku tersebut, diperoleh data capaian kinerja LPTK pada Tahun 2025 sebesar 107,97% sebagaimana dashboard kinerjaku berikut:



Gambar 1. Dashboard Capaian Kinerja LPTK Tahun 2025
Sumber: Aplikasi Kinerjaku Tahun 2025 (www.kinerjaku.kkp.go.id)

Adapun rincian capaian dari masing-masing Indikator Kinerja (IK) pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPTK (%) dengan target sebesar 85% dan capaian 85% atau persentase capaian sama dengan 120%;
2. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LPTK (Nilai) dengan target sebesar 92 dengan capaian sama dengan 96,49 atau persentase capaian sama dengan 104,88%;
3. Penilaian Mandiri SAKIP LPTK (Nilai) dengan target sebesar 80 dengan capaian sebesar 81,20 atau sama dengan 101,50%;
4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LPTK (Nilai) dengan target sebesar 71,5 dengan capaian sebesar 100 atau sama dengan 120%;
5. Indeks Profesionalitas ASN LPTK (Indeks) dengan target sebesar 83 dengan capaian sebesar 90,36 atau sama dengan 108,87%;
6. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LPTK (%) dengan target sebesar 80 dengan capaian sebesar 100 atau sama dengan 120%;
7. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LPTK (%) dengan target sebesar 80 dengan capaian sebesar 100 atau sama dengan 120%;
8. Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja LPTK (Proposal) dengan target sebesar 1 dengan capaian sebesar 1 atau sama dengan 100%;
9. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LPTK (Nilai) dengan target sebesar 80 dengan capaian sebesar 81,58 atau sama dengan 101,98%;
10. Persentase Dukungan Manajemen Teknis Kegiatan Strategis Lainnya LPTK (%) dengan target sebesar 100 dengan capaian sebesar 100 atau sebesar 100%

Dari hasil capaian 10 IK tersebut, 3 IK masuk dalam kategori Istimewa (Persentase capaian 110-120%), dan 7 IK masuk dalam kategori Baik (Persentase capaian 90-110%). Secara umum, pencapaian kinerja LPTK adalah baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja, yang dapat tercapai semuanya, bahkan beberapa melebihi target yang ditetapkan. Dari sisi akuntabilitas keuangan, realisasi anggaran LPTK pada Tahun 2025 sebesar Rp. 3.157.428.452,- dari pagu anggaran Rp. 3.188.726.000,- (99,02%).

Guna mewujudkan kinerja yang optimal dan memenuhi target yang telah ditetapkan, sejumlah rekomendasi yang perlu mendapat perhatian diantaranya :

1. Monitoring Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja yang memiliki target triwulanan maupun tahunan tetap harus dimonitor perkembangan pelaksanaan kegiatannya. Penanggung jawab IK agar memastikan bahwa capaian akhir tahun dapat dicapai dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan.

2. Verifikasi Capaian Indikator

Dalam rangka akuntabilitas atas capaian IK, kegiatan verifikasi perlu dilakukan secara berkala guna memastikan bahwa capaian yang diklaim sesuai bukti dukung yang ada, disamping itu verifikasi penting dilaksanakan agar pengukuran dan pelaporan kinerja dapat dilakukan secara disiplin dan tepat waktu.

3. Pelaporan Kinerja

Dalam rangka akuntabilitas atas implementasi SAKIP, kegiatan penyusunan laporan kinerja perlu disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dimana harus terdapat unsur perbandingan antar satker sejenis K/L dan sebagai tindak lanjut rekomendasi atas penilaian SAKIP ditahun sebelumnya, dengan memastikan tim pengelola/penyusun laporan kinerja untuk menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level kementerian/level unit kerja lingkup BPPSDMKP.

4. Pelaksanaan kegiatan sebaiknya mengikuti RPD yang telah dibuat agar realisasi anggaran tiap bulannya dapat terserap sesuai rencana serta meminimalisir deviasi halaman III DIPA.



BAB I

PENDAHULUAN

- 1.1. LATAR BELAKANG**
- 1.2. TUJUAN**
- 1.3. TUGAS DAN FUNGSI**
- 1.4. KERAGAAN SUMBER DAYA MANUASIA**
- 1.5. SISTEMATIKA LAPORAN**
- 1.6. POTENSI DAN PERMASALAHAN**

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden (PERPRES) No 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, serta berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksud dengan laporan kinerja yaitu, bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja berkewajiban menyelenggarakan SAKIP dan pelaksanaannya disusun dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj). Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan : a) rencana strategis; b) perjanjian kinerja; c) pengukuran kinerja; d. pengelolaan data kinerja; e) pelaporan kinerja; dan f) reviu dan evaluasi kinerja. Laporan Kinerja juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (good governance) dapat terwujud.

Adapun dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- c. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.2. Tujuan

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja ini bertujuan:

1. Memberikan informasi yang terukur atas capaian kinerja LPTK pada periode Tahun 2025.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi satuan kerja untuk meningkatkan kinerjanya.

1.3. Tugas dan Fungsi

Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan, yang selanjutnya disebut LPTK, merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang bertanggung jawab kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP). LPTK memiliki tugas melakukan perekayasaan teknologi kelautan dalam rangka mendukung visi BPPSDM KP, yakni sebagai Inovator IPTEK dan Motivator Industrialisasi Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan.

Kegiatan perekayasaan yang dilakukan oleh LPTK diarahkan untuk menjalankan fungsi pengembangan institusi, menciptakan inovasi dan pengembangan teknologi yang dilakukan melalui kerjasama lintas instansi, baik pemerintah maupun swasta. Sebagai institusi riset dibawah BPPSDM KP, LPTK bertugas melakukan perekayasaan dibidang alat dan mesin untuk konservasi dan pengawasan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil. LPTK berkomitmen untuk mendukung program Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam merencanakan program kerjanya sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.40/Men/2011 yang diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 85/Permen-KP/2020 yaitu: a) penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta laporan dibidang perekayasaan teknologi kelautan; b) pelaksanaan perekayasaan teknologi kelautan di bidang alat dan mesin untuk konservasi dan pengawasan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; c) pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerja sama perekayasaan teknologi kelautan dibidang alat dan mesin untuk konservasi dan pengawasan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; dan d) pelaksanaan urusan ketatausaha.

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, LPTK dibantu oleh unit kerja dibawahnya yang terdiri dari: a) Urusan Umum; b) Koordinator dan; c) Kelompok Jabatan Fungsional. Urusan Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan. Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugas Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan. Sedangkan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Adapun struktur organisasi LPTK dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:



Gambar 2. Struktur Organisasi Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan

Sejalan dengan perkembangan, pada tanggal 24 Agustus 2021 setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang menyebutkan bahwa tugas, fungsi dan kewenangan pada unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan kementerian/lembaga dialihkan menjadi tugas, fungsi dan kewenangan BRIN (tertuang dalam Pasal 65 ayat 1) sehingga LPTK tidak dapat lagi melaksanakan tugas dan fungsi riset.

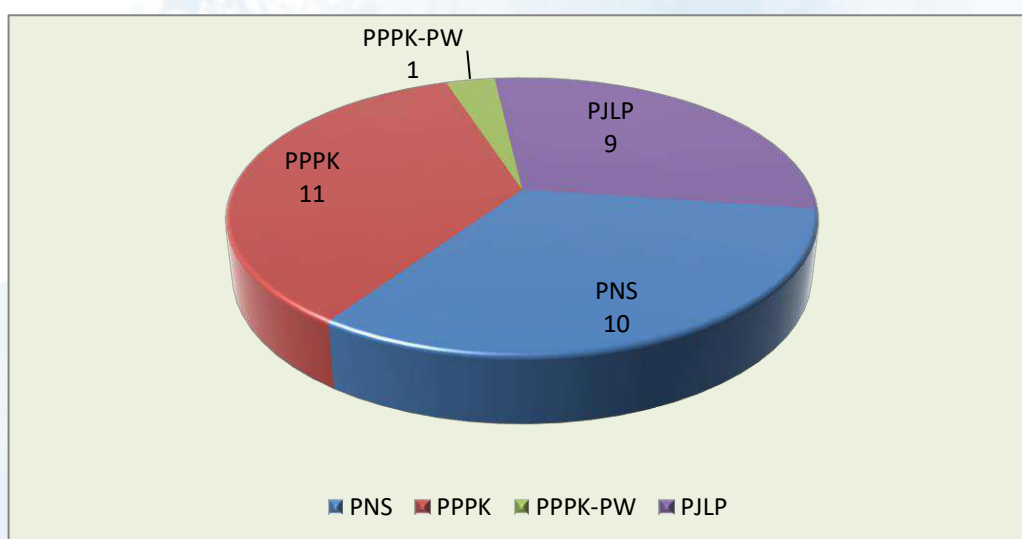
Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Keputusan Kepala BPPSDM KP Nomor 206 Tahun 2024 Tentang Unit Organisasi Pembina Administrasi dan Teknis Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPPSDM, LPTK selaku UPT eks-riset kini dibawah koordinasi Sekretariat BPPSDM KP, dimana sebelumnya LPTK dibawah koordinasi Pusat Riset Kelautan. Adapun pada PermenKP tersebut terdapat satu pusat baru di lingkungann BPPSDMKP yaitu Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Kelautan dan Perikanan, dan LPTK direncanakan akan menjadi bagian dari pusat tersebut. Sampai saat ini LPTK mengampu tusi manajerial dengan kegiatan dukungan manajerial selain itu juga LPTK menjalankan kegiatan penyelenggaraan layanan public yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Sementara itu, dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menugaskan pegawai dalam bentuk Surat Tugas untuk menjadi ketua dan/atau anggota Tim Kerja pada Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan nomor B.27/LPTK/KP.440/I/2025 tanggal 15 Januari 2025. Susunan keanggotaan Tim Kerja LPTK hanya terdiri dari 1 tim kerja, yaitu Dukungan Manajemen. Adapun uraian fungsi Tim Kerja Dukungan Manajemen LPTK antara lain sebagai berikut:

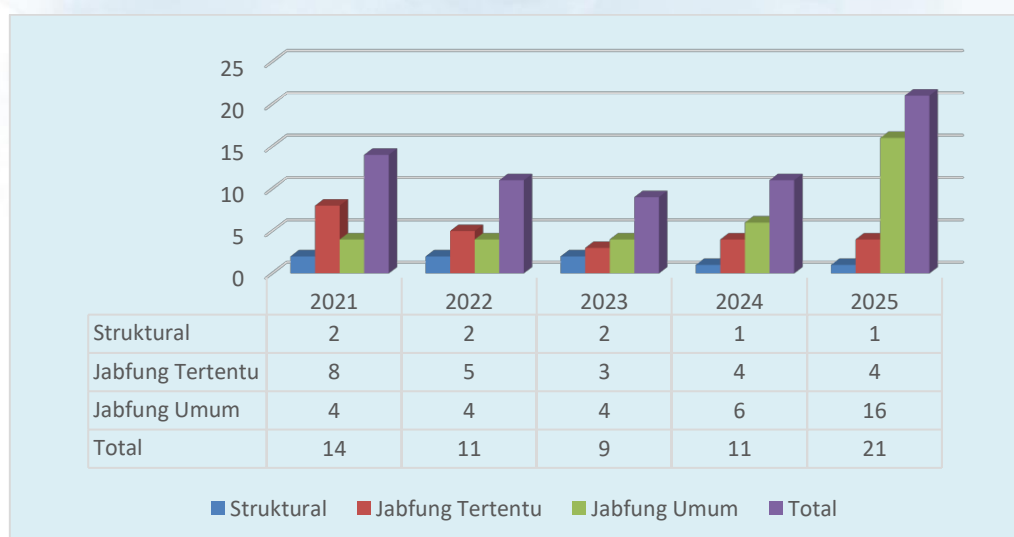
- a. Koordinasi dan pelaksanaan penyiapan dokumen keperluan Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN), Pengelolaan Administrasi kepegawaian, Penilaian Kinerja pegawai serta peningkatan kapasitas pegawai;
- b. Koordinasi, persiapan dan pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan program, kebijakan, kegiatan, dan anggaran kelautan dan perikanan, pendampingan perencanaan kegiatan dan anggaran, pengelolaan kinerja, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kegiatan;
- c. Koordinasi dan pelaksanaan penyusunan dokumen kegiatan dan anggaran, pengelolaan belanja pegawai, perencanaan kebutuhan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan, realisasi keuangan, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), penyiapan dokumen keperluan pengawasan aparat fungsional dan tindaklanjutnya serta penataan dokumen keuangan;
- d. Koordinasi, persiapan dan pelaksanaan layanan dukungan manajemen internal LPTK.

1.4. Keragaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah sumberdaya manusia LPTK sampai dengan Tahun 2025 adalah sebanyak 31 personil yang terdiri atas 21 Aparatur Sipil Negara (ASN), terdiri atas 10 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 11 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/PPPK (10 orang merupakan PPPK baru yang terangkat pada Oktober 2025), 1 orang PPPK Paruh Waktu dan 9 orang PJLP.. Dari 21 ASN yang ada, 1 pegawai menduduki jabatan Struktural, 4 pegawai Jabatan Fungsional Tertentu serta 16 pegawai adalah Jabatan Fungsional Umum. Komposisi dan Keragaan SDM LPTK pada Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. Komposisi SDM Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Tahun 2025



Gambar 4. Keragaan ASN Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Tahun 2020-2024

1.5. Sistematika Laporan Kinerja

Laporan Kinerja Tahunan ini bertujuan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2025, yaitu dengan melakukan analisis atas capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2025 terhadap rencana kinerja (*performance plans*) Tahun 2025. Analisis tersebut memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai umpan balik perbaikan kinerja di tahun berikutnya. Sejalan dengan hal tersebut, sistematika penyajian laporan kinerja adalah sebagai berikut:

- Kata Pengantar, menyajikan pengantar laporan;
- Ringkasan Eksekutif, berisi ringkasan dari laporan, meliputi: uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja, dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja;
- Bab I Pendahuluan, berisi penjelasan umum organisasi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi organisasi;
- Bab II Perencanaan Kinerja, berisi uraian singkat tentang Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun Berjalan, serta Pengukuran Kinerja;
- Bab III Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja Organisasi

Berisi capaian kinerja dari indikator- indikator kinerja telah ditetapkan. Untuk setiap pernyataan kinerja dari sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja yang meliputi:

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun berjalan;
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
- d. Membandingkan antara realisasi tahun berjalan dengan unit kerja yang lain yang setara di kementerian;
- e. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan dan peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah di lakukan;
- f. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- g. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dan pencapaian pernyataan kinerja.

Realisasi Anggaran

Uraian realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;

- Bab IV Penutup, Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya;
- Lampiran, Berisi Perjanjian Kinerja atau dokumen pendukung lainnya.

1.6. Potensi dan Permasalahan

A. Potensi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LPTK didukung oleh sumber daya manusia, sumber daya fisik dan sumber daya teknologi. Sumber daya fisik berupa aset kantor yang meliputi gedung bangunan kantor, gedung pelayanan publik serta instalasi radar *AIS base station*. Instalasi radar LPTK sampai saat ini merupakan aset yang krusial yang masih berfungsi sebagai sarana pengawasan lalu lintas di perairan Wakatobi. Sumber daya manusia terdiri atas jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu, jabatan fungsional umum. Keberadaan sumber daya dan lptek memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan.

B. Permasalahan

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan Perekayasaan Teknologi Kelautan berkenaan dengan kebijakan tingkat nasional yang menyatukan kegiatan riset sehingga menyebabkan perubahan mendasar pada organisasi yang melaksanakan riset. Terbitnya peraturan Presiden No 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional mengambil alih tugas dan fungsi riset di kementerian dan lembaga sehingga kegiatan riset LPTK menjadi tidak lagi dapat dilaksanakan sejak tahun 2022 sampai dengan saat ini dan selama organisasi baru belum terbentuk. Sehingga unit kerja yang memiliki tugas riset sejak tahun 2022 sampai dengan saat ini hanya melaksanakan kegiatan kinerja dukungan manajerial dan penyelenggaraan layanan public.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. TARGET KINERJA 2025-2029**
- 2.2. RENCANA KERJA TAHUN 2025**
- 2.3. PERJANJIAN KINERJA**
- 2.4. PENGUKURAN KINERJA**

2.1. Target Kinerja 2025-2029

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan kementerian Kelautan dan Perikanan Pasal 11 Bagian Ketiga Rencana Strategis dijelaskan bahwa bahwa dokumen Rencana Strategis (Renstra) terdiri atas Renstra Kementerian dan Renstra Unit Organisasi Eselon I sehingga sejak berlakunya peraturan tersebut, LPTK selaku UPT tidak lagi membuat Renstra, namun demikian untuk perencanaan jangka menengah LPTK mempunyai indikator dan target kinerja tahun 2025-2029 yang dibuat berpedoman pada Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029. Sebagian besar Indikator Kinerja adalah bersifat mandatori. Adapun Indikator dan Target Kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan tahun 2025-2029 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 1. Target Kinerja LPTK 2025-2029

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2025-2029				
					2025	2026	2027	2028	2029
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPTK (%)	85	86	87	88	89
			2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LPTK (Nilai)	92	92,1	92,15	92,2	92,2
			3	Penilaian Mandiri SAKIP LPTK (Nilai)	80	80,25	80,50	80,75	81
			4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LPTK (Nilai)	71,5	71,75	72	72,25	72,5
			5	Indeks Profesionalitas ASN LPTK (Indeks)	83	83	84	84	85
			6	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LPTK (%)	80	81	82	83	84
			7	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LPTK (%)	80	81	82	83	84
			8	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja LPTK (Proposal)	1	1	1	1	1
			9	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LPTK (Nilai)	80	81	82	83	84
			10	Persentase Dukungan Manajemen Teknis Kegiatan Strategis Lainnya LPTK (%)	100	100	100	100	100

2.2. Rencana Kerja Tahun 2025

Sebagai pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) maka tiap tahun ditetapkan Rencana Kerja (Renja). Dokumen rencana kerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan merupakan dokumen perencanaan kegiatan yang menjelaskan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 dengan rincian kegiatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. Rencana Kerja LPTK Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	DIPA AWAL	DIPA Revisi Ke-1	DIPA Revisi Ke-2 s.d 3	DIPA Revisi Ke-4 s.d 5	DIPA Revisi Ke- 6 s.d 7 (akhir)
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Terdiri atas 3 KRO yang memuat 10 RO	Terjadi Blokir Efisiensi. DIPA terdiri atas 3 KRO yang memuat 10 RO, 5 RO seluruh pagu anggarannya terblokir	Terjadi Relaksasi blokir anggaran	Penghapusan pagu blokir dari DIPA sehingga RO yang pagu anggarannya terblokir semua terhapus dalam DIPA	Terjadi Penambahan Belanja Pegawai
	PAGU TOTAL	4.403.513.000	4.403.513.000	4.403.513.000	2.769.656.000	3.188.726.000
	PAGU BLOKIR	134.346.000	1.666.257.000	1.633.857.000	-	-
	PAGU EFEKTIF	4.269.167.000	2.737.256.000	2.769.656.000	2.769.656.000	3.188.726.000

Pada awal Tahun 2025 total anggaran LPTK adalah sebesar Rp. 4.403.513.000,- (Empat milyar empat ratus tiga juta lima ratus empat belas ribu rupiah) yang terdiri atas 3 (*tiga*) Klasifikasi Rincian Output yang memuat 10 (*sepuluh*) Rincian Output (RO) yaitu: 1)Layanan BMN, 2)Layanan Hubungan Masyarakat, 3)Layanan Umum, 4)Layanan Data dan Informasi, 5)Layanan Perkantoran, 6)Layanan Manajemen SDM, 7)Layanan Perencanaan dan Penganggaran, 8)Layanan Pemantauan dan Evaluasi, 9)Layanan Manajemen Keuangan, dan 10)Layanan Penyelenggaraan Kearsipan. Dalam perjalanannya terjadi beberapa kali revisi anggaran, baik blokir anggaran, relaksasi blokir, penghapusan pagu blokir, serta penambahan pagu belanja pegawai sehingga pagu akhir LPTK pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. 3.188.726.000,- (*Tiga milyar seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah*). Yang terdiri atas 2 KRO dan 5 RO yaitu: 2)Layanan Hubungan Masyarakat, 2)Layanan Umum, 3)Layanan Data dan Informasi, 4)Layanan Perkantoran, dan 5)Layanan Manajemen Keuangan.

2.3. Perjanjian Kinerja (PK)

Dalam rangka mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka dibuat Perjanjian Kinerja LPTK Tahun 2025 yang telah menerapkan/menggunakan manajemen kinerja dengan yang berisi langkah-langkah strategis jangka menengah yang akan memberi arah bagi para penanggung jawab kegiatan dalam melaksanakan tugas.

Perjanjian Kinerja LPTK level 3 dibuat sebagai pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi yang diturunkan dari rencana kerja Tahun 2025 kementerian dan program BPPSDMKP.

Dokumen perjanjian kinerja memuat informasi tentang program, sasaran kegiatan, indikator kinerja dan target yang akan dicapai serta alokasi anggaran per tahun. Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 LPTK telah menetapkan rencana untuk merealisasikan 1 Sasaran Kegiatan yang terdiri atas 10 (sepuluh) Indikator Kinerja sebagai penjabaran atas sasaran kegiatan Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 4.403.513.000,- yang ditandatangani pada 30 Januari 2025 oleh Plt. Kepala LPTK (Bpk. Aliruddin) dengan Sekretaris BPPSDM KP (Bpk. Rudi Alek Wahyudin). Pada tahun 2025 terdapat 1 kali revisi/perubahan Perjanjian Kinerja yaitu pada tanggal 5 Desember 2025. Dalam revisi tersebut tidak terjadi perubahan indikator dan target kinerja, namun perubahan pada pejabat penandatangan pada Plt. Sekretaris BPPSDM KP (Bpk. Joni Haryadi D) serta dukungan pagu anggaran menyesuaikan DIPA revisi terakhir yaitu sebesar Rp.3.188.726.000,-.

Adapun Indikator Kinerja dan target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. Perjanjian Kinerja LPTK Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPTK (%)	85
		2.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LPTK (Nilai)	92
		3.	Penilaian Mandiri SAKIP LPTK (Nilai)	80
		4.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LPTK (Nilai)	71,5
		5.	Indeks Profesionalitas ASN LPTK (Indeks)	83
		6.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LPTK (%)	80

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		7.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LPTK (%)	80
		8.	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja LPTK (Proposal)	1
		9.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LPTK (Nilai)	80
		10.	Persentase Dukungan Manajemen Teknis Kegiatan Strategis Lainnya LPTK (%)	100

2.4. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Kegiatan (IK) yang telah diidentifikasi agar sasaran dan tujuan strategis pada peta strategi yang dituangkan pada penetapan kinerja Tahun 2025 dapat tercapai.

Pengukuran capaian kinerja LPTK Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi pada masing-masing Indikator Kinerja sehingga akan diperoleh indeks capaian Indikator Kinerja. Perhitungan indeks capaian Indikator Kinerja perlu memperhitungkan jenis polarisasi Indikator Kinerja yang berlaku yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian Indikator Kinerja adalah :

- 1) Angka maksimum adalah 120;
- 2) Angka minimum adalah 0;
- 3) Formula perhitungan indeks capaian IKK untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;
- 4) Status indeks capaian IKK adalah sebagai berikut :



Gambar 5. Status Indeks Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Dalam melakukan pengukuran kinerja harus menentukan klasifikasi target indikator kinerja diantaranya adalah : Maximize adalah Semakin tinggi pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; Minimize adalah Semakin rendah pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; Stabilize adalah semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IK pada masing-masing Indikator yang ada dalam Perjanjian Kinerja. Adapun metode pengukuran kinerja dilakukan secara berkala tiap triwulan serta tahunan. Pengukuran kinerja dilakukan oleh tim yang melaksanakan pengukuran dan pelaporan kinerja.

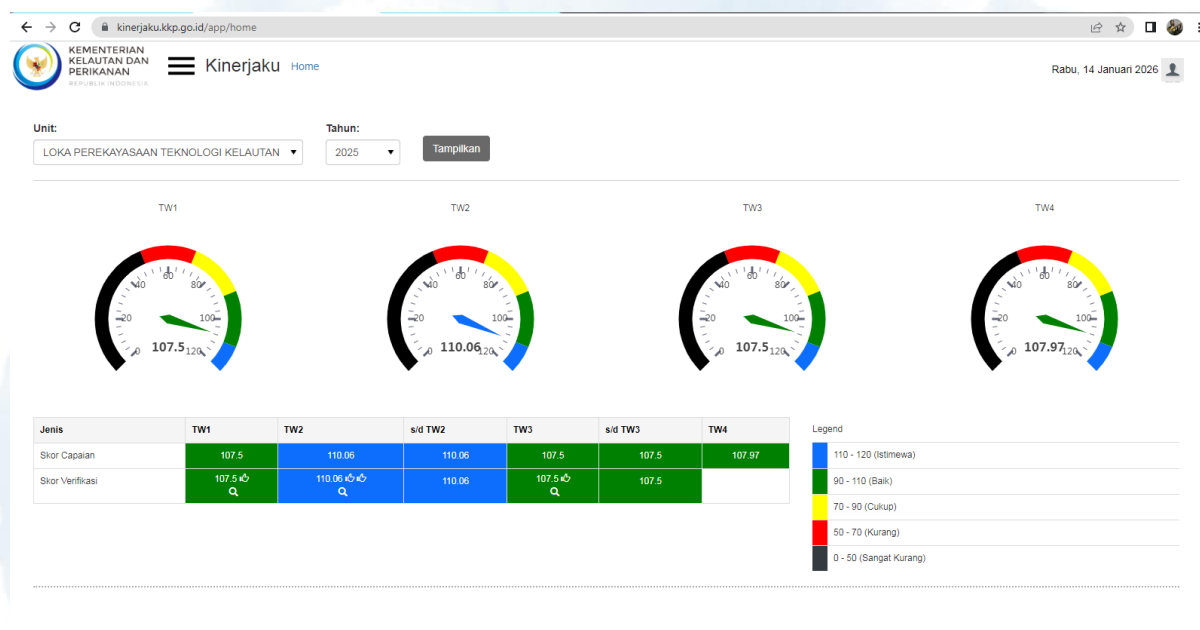
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. PRESTASI INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2025**
- 3.2. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA**
- 3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2025**
- 3.4. EFISIENSI ANGGARAN DAN SUMBERDAYA**
- 3.5. PELAKSANAAN KEGIATAN POSITIF LAINNYA**

3.1. Prestasi Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2025

Pencatatan dan Pengukuran capaian kinerja LPTK Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (*key performance indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *logical frame work* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada laman <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh nilai capaian kinerja LPTK Tahun 2025 sebesar 107,97% sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 6. Dashboard Kinerjaku LPTK Tahun 2025

Dari hasil pengukuran kinerja Tahun 2025 dapat diketahui bahwa capaian kinerja telah mencapai target yang ditetapkan dengan nilai kinerja baik yang ditunjukkan dengan indikator berwarna hijau. Pada Tahun 2025, LPTK memiliki tanggungjawab untuk merealisasikan 1 Sasaran Kegiatan yang memuat 10 Indikator Kinerja Kegiatan (IK). Dari 10 Indikator Kinerja Kegiatan tersebut 3 (tiga) IK tercapai kategori “ISTIMEWA”, yaitu IK 4) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LPTK (Nilai) target 71,5 capaian 100 (120%); IK 6) Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LPTK (%) target 80 capaian 100 (120%); dan IK 7) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LPTK (%) target 80 capaian 100 (100%)

Sedangkan 7 (tujuh) IK lainnya masuk dalam kategori “BAIK” yaitu: IK 1) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPTK (%); IK 2) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LPTK (Nilai) target 92 capaian 96,49; IK 3) Penilaian Mandiri SAKIP LPTK (Nilai) target 80 capaian 81,20 (101,50%); IK 5) Indeks Profesionalitas ASN LPTK (Indeks) target 83 capaian 90,36 (108,87%); IK 8) Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja LPTK (Proposal) target 1 capaian 1 (100%); IK 9) Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LPTK (Nilai) target 80 capaian 81,58 (101,98%); dan IK 10) Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya LPTK (%) target 100 capaian 100 (100%)

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi LPTK. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Kegiatan (IK) yang telah diidentifikasi agar sasaran-sasaran kegiatan dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam kontrak kinerja pada Tahun 2025 dapat tercapai.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada masing-masing sasaran kegiatan menunjukkan kinerja baik (mencapai target yang telah ditetapkan) yang ditandai dengan warna biru dan hijau sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4. Target dan Capaian Kinerja LPTK Tahun 2025

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN 2025		%
			TARGET	REALISASI	
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPTK (%)	85	85	100,00%
		2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LPTK (Nilai)	92	96,49	104,88%
		3 Penilaian Mandiri SAKIP LPTK (Nilai)	80	81,2	101,50%
		4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LPTK (Nilai)	71,5	100	120,00%
		5 Indeks Profesionalitas ASN LPTK (Indeks)	83	90,36	108,87%
		6 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LPTK (%)	80	100	120,00%
		7 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LPTK (%)	80	100	120,00%
		8 Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja LPTK (Proposal)	1	1	100,00%
		9 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LPTK (Nilai)	80	81,58	101,98%
		10 Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya LPTK (%)	100	100	100,00%

Rincian pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IK) pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

SK 1 : Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut terdiri dari 10 (sepuluh) IK sebagai berikut :

IK 1 : Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPTK (%)

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPTK adalah Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan sampai dengan waktu pengukuran.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja LPTK tahun 2025 ditetapkan target IK ini adalah persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LPTK sebesar 85%. Capaian IK ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Capaian Kinerja IK 1 pada Tahun 2025

SK-1		Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan							
IK-1		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPTK (%)							
Realisasi Tahun 2021 - 2024				Target dan Realisasi Tahun 2025				Target Kinerja 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan Tahun 2024-2025	Target 2029	% Capaian
-	100	80	82	85	85	100,00%	3,66%	89	95,51%

Pada tahun 2025 capaian IK ini telah mencapai target yang ditetapkan, yakni persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LPTK sebesar 85% dari target 85%, atau dengan presentase capaian sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan Surat dari BPPSDMKP Nomor B.94/BPPSDMKP.1/RC.610/I/2026 tanggal 9 Januari 2026 tentang Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja unit eselon I lingkup KKP” tahun 2025.

Capaian IK ini lebih tinggi apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu sebesar 82% serta capaian IK sama apabila dibandingkan dengan capaian sesame UPT eks-riset kelautan yaitu Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP) yaitu sebesar 80%

Keberhasilan capaian IK ini disebabkan oleh tidak ada temuan atau tindak lanjutnya telah tuntas. Tercapainya IK ini (tidak ada temuan pengawasan dari itjen) merupakan keberhasilan dari pengendalian intern terhadap faktor-faktor yang menjadi titik kritis dari kegiatan yang ada di LPTK.

Kegiatan yang mendukung keberhasilan capaian IK ini adalah pengendalian intern terhadap faktor-faktor yang mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan antara lain komitmen pimpinan dalam percepatan temuan.

Dalam rangka mencapai IK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.600.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.600.000,- atau sebesar 100%.

IK 2 : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LPTK (nilai)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 (delapan) indikator kinerja pelaksanaan anggaran, yaitu Revisi DIPA (10%), Devisiasi RPD (10%), Penyerapan Anggaran (20%), Belanja Kontraktual (10%), Penyelesaian Tagihan (5%), Pengelolaan UP dan TUP (10%), Dispensasi SPM (5%), dan Capaian Output (25%).

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di bagi menjadi 4 (empat) antara lain : a) Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ; b) Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$; c) Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau d) Kurang, apabila nilai IKPA < 70 . Nilai IKPA diambil dari nilai yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI dalam aplikasi monev PA dengan alamat <https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/>

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Tahun 2025 target IK ini adalah nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LPTK adalah sebesar 92. Capaian IK ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Capaian Kinerja IK 2 pada Tahun 2025

SK-1 Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan									
IK-4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LPTK (Nilai)									
Realisasi Tahun 2021 - 2024				Target dan Realisasi Tahun 2025				Target Kinerja 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan Tahun 2024-2025	Target 2029	% Capaian
-	85,69	86,21	99,6	92	96,49	104,88%	-3,12%	92,2	104,65%

Pada tahun 2025 capaian IK ini telah mencapai target yang ditetapkan, yakni nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LPTK sebesar 96,49 dari target sebesar 92 atau dengan persentase capaian sebesar 104,88%. Capaian ini berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 111/SJ.2/RC.610/I/2026 tanggal 10 Januari 2026 perihal Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester II Tahun 2025.

Capaian IK ini lebih rendah apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu sebesar 99,6 hal tersebut dikarenakan deviasi penyerapan halaman III DIPA tahun ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. capaian IK ini lebih tinggi apabila dibandingkan dengan capaian sesama UPT eks-riset kelautan yaitu Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP) yaitu sebesar 95,85.

Keberhasilan capaian IK ini disebabkan oleh konsistensi penyerapan anggaran yang telah tertuang dalam halaman III DIPA sehingga meminimalisir deviasi antara penyerapan anggaran dan perencanaan anggaran.

Kegiatan yang mendukung keberhasilan capaian IK ini adalah koordinasi yang intensif antara tim perencanaan dengan tim pelaksanaan serta tim keuangan dalam melaksanakan belanja yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mencapai IK ini semula telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 11.474.000,- Namun demikian pada perjalanannya terdapat kebijakan efisiensi yang menyebabkan terhapusnya alokasi anggaran tersebut, namun demikian hal ini tidak mengurangi kinerja dalam capaian IK tersebut.

IK 3 : Penilaian Mandiri SAKIP LPTK (nilai)

Nilai PM SAKIP Loka Perekrayasaan Teknologi Kelautan dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP LPTK merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP.

Target capaian IK ini pada tahun 2025 adalah nilai Penilaian Mandiri SAKIP LPTK adalah sebesar 80. Capaian IK ini tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 7. Capaian Kinerja IK 3 pada Tahun 2025

SK-1 Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan									
IK-3 Penilaian Mandiri SAKIP LPTK (Nilai)									
Realisasi Tahun 2021 - 2024				Target dan Realisasi Tahun 2025				Target Kinerja 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan Tahun 2024-2025	Target 2029	% Capaian
-	-	80,05	82,25	80	81,2	101,50%	-1,28%	81	100,25%

Pada tahun 2025 capaian ini telah melebihi target yang ditetapkan, yakni nilai PM SAKIP LPTK sebesar 81,2 dari target 80, atau persentase sebesar 101,50%. Capaian ini berdasarkan surat dari BPPSDM KP Nomor B.4486/BRSDM.1/RC.510/VII/2025 tanggal 7 Juli 2025 perihal Hasil Penilaian Mandiri SAKIP level 3 lingkup BPPSDM.

Capaian IK ini sedikit lebih rendah apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu sebesar 82,25 serta capaian IK lebih rendah apabila dibandingkan dengan capaian sesame UPT eks-riset kelautan yaitu Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP) yaitu sebesar 83,5. Hal yang perlu ditingkatkan adalah pada komponen Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar mendapatkan skor maksimal.

Faktor yang mendukung tercapainya IK ini diantaranya adalah komitmen kepala Loka dan koordinasi yang baik dari penanggungjawab kegiatan/laporan dengan tim SAKIP LPTK serta terlaksananya monitoring dan evaluasi secara kontinyu.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian IK ini antara lain adalah ketersediaan data dukung SAKIP selama 5 tahun yang terdiri dari 1_Pemenuhan dokumen SAKIP meliputi dokumen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal; 2_Pengisian hasil penilaian mandiri SAKIP pada aplikasi DSMS BPPSDM dan 3_Pengisian hasil penilaian mandiri SAKIP pada aplikasi kinerjaku

Dalam rangka mencapai IK ini semula telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 23.526.000,- Namun demikian pada perjalanannya terdapat kebijakan efisiensi yang menyebabkan terhapusnya alokasi anggaran tersebut, namun demikian hal ini tidak mengurangi kinerja dalam capaian IK tersebut.

IK 4 : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LPTK (nilai)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran.

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator. Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain

- a. Sangat Baik, apabila $NKA > 90$;
- b. Baik, apabila $NKA > 80 - 90$;
- c. Cukup, apabila $NKA > 60 - 80$;
- d. Kurang, apabila $NKA > 50 - 60$;
- e. Sangat Kurang, apabila < 50 .

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Tahun 2025, target IK ini adalah nilai kinerja perencanaan anggaran LPTK sebesar 71,5. Adapun capaian IK ini tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 8. Capaian Kinerja IK 4 pada Tahun 2025

SK-1	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan								
IK-4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LP TK (Nilai)								
Realisasi Tahun 2021 - 2024				Target dan Realisasi Tahun 2025				Target Kinerja 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan Tahun 2024-2025	Target 2029	% Capaian
-	85,69	86,21	99,6	71,5	100	120,00%	0,40%	72,5	137,93%

Pada tahun 2025 capaian IK ini telah melebihi target yang ditetapkan, yakni sebesar 100 dari target 71,5 dengan presentase capaian sebesar 120%. Capaian ini berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 138/SJ.2/RC.610/I/2026 tanggal 15 Januari 2025 perihal Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Level Unit Eselon I dan Level Satker di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.

Capaian IK ini lebih tinggi apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu sebesar 99,6% serta capaian IK sama apabila dibandingkan dengan capaian sesame UPT eks-riset kelautan yaitu Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP) yaitu sebesar 100%

Keberhasilan capaian IK ini disebabkan oleh adanya pengelolaan keuangan dan kegiatan yang dilaksanakan secara sinergi, kolaborasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran serta terlaksananya monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan kegiatan secara kontinu.

Kegiatan yang mendukung keberhasilan capaian IK ini adalah kegiatan pelaporan capaian output (caput) di aplikasi sakti serta aplikasi monev kemenkeu.

Dalam rangka mencapai IK ini semula telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- Namun demikian pada perjalanannya terdapat kebijakan efisiensi yang menyebabkan terhapusnya alokasi anggaran tersebut, namun demikian hal ini tidak mengurangi kinerja dalam capaian IK tersebut.

IK 5 : Indeks Profesionalitas ASN LPTK (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

IK Indeks profesionalitas ASN Lingkup LPTK merupakan indikator yang dibentuk seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. IK ini diukur secara Semesteran. Berdasarkan Surat dari Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara No. 006//B.BM.02.01/SD/C/2023 Tanggal 22 Mei 2023, perihal Pengukuran Indeks

Profesionalitas ASN Tahun 2022 dan Nota Dinas Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi terjadi perubahan pengukuran indeks IP ASN sebagai berikut:

1. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024 dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi ASN (SIASN) pada Layanan indeks Profesionalitas ASN.
2. Penyesuaian instrumen pada dimensi Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024 meliputi : 1) Kualifikasi; 2) Kompetensi; 3) Kinerja dan 4) Disiplin

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Tahun 2025, target IK ini adalah nilai Indeks Profesionalitas ASN LPTK sebesar 83. Capaian IK ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Capaian Kinerja IK 5 pada Triwulan II Tahun 2025

SK-1		Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan							
IK-5		Indeks Profesionalitas ASN LPTK (Indeks)							
Realisasi Tahun 2021 - 2024				Target dan Realisasi Tahun 2025				Target Kinerja 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan Tahun 2024-2025	Target 2029	% Capaian
81,67	78,75	87,88	91,3	83	90,36	108,87%	-1,03%	85	106,31%

Pada Tahun 2025 capaian IK ini telah mencapai target yang ditetapkan, yakni nilai Indeks Profesionalitas ASN LPTK sebesar 90,36 dari target 83, atau dengan presentase capaian sebesar 108,87%. Capaian ini berdasarkan Nota Dinas dari Plt. Sekretaris BPPSDMKP Nomor : 62/BPPSDM.1/KP.720/I/2026 tanggal 6 Januari 2026 tentang Capaian IP ASN Tahun 2025 lingkup BPPSDM.

Capaian IK ini lebih rendah apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu sebesar 91,3 serta capaian IK lebih rendah apabila dibandingkan dengan capaian sesame UPT eks-riset kelautan yaitu Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP) yaitu sebesar 95.

Keberhasilan capaian IK ini disebabkan terdatanya kualifikasi Pendidikan pegawai secara menyeluruh, meningkatnya kompetensi pegawai melalui diklat jabatan fungsional, pendidikan dan pelatihan, serta seminar, nilai kinerja satuan kerja dan pegawai yang baik, pengelolaan data pegawai pada aplikasi myasn serta tercatatnya pengawasan dan pemantauan disiplin ASN.

Kegiatan pendukung yang menunjang keberhasilan capaian IK ini adalah antara lain adalah Rekap Kualifikasi Pendidikan ASN, Rekap Kompetensi ASN, Rekap SKP, Rekap Diklat/Seminar ASN dan Rekap Disiplin Pegawai/Presensi

Dalam rangka mencapai IK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.732.583.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.1.711.666.167,- atau dengan persentase sebesar 98,43%

IK 6 : Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LPTK (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP pemerintah

mengumumkan secara terbuka pemaketan yang akan dilaksanakan oleh LPTK. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SIRUP dapat merepresentasikan kualitas PBJ di LPTK. Rekon Kinerja adalah skoring kertas kerja rekon yang merupakan tahap akhir dari penilaian rekonsiliasi data kinerja.

Nilai ini didapatkan dari hasil persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dibandingkan dengan pagu pengadaan satker. Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Tahun 2025, target IK ini adalah Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LPTK sebesar 80%. Capaian IK ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10. Capaian Kinerja IK 6 pada Triwulan II Tahun 2025

SK-1 Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan									
IK-6 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LPTK (%)									
Realisasi Tahun 2021 - 2024				Target dan Realisasi Tahun 2025				Target Kinerja 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan Tahun 2024-2025	Target 2029	% Capaian
-	-	-	-	80	100	120,00%	#VALUE!	84	119,05%

Pada tahun 2025 capaian IK ini telah mencapai target yang ditetapkan, yakni Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LPTK sebesar 100% dari target 80%, atau dengan presentase capaian sebesar 120%. Capaian ini berdasarkan Nota Dinas Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Jenderal KKP Nomor: 41/SJ.7/PL.410/I/2026 tanggal 13 Januari 2026 perihal Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan 4 tahun anggaran 2025.

IK ini merupakan IK baru yang ada di LPTK sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. capaian IK sama apabila dibandingkan dengan capaian sesame UPT eks-riset kelautan yaitu Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP) yaitu sebesar 100%

Keberhasilan capaian IK ini adalah telah terumumkannya semua rencana umum pengadaan PBJ LPTK khususnya pasca revisi DIPA maupun POK sehingga pagu pengadaan pada SIRUP dapat sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran yang terbaru.

Kegiatan yang menunjang tercapainya IK ini diantaranya adalah koordinasi yang baik antara bagian perencanaan dan bagian pengadaan barang/jasa sehingga dapat bergerak cepat menyesuaikan inputan SIRUP pasca efisiensi/revisi anggaran.

Dalam rangka mencapai IK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.518.014.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.509.871.881,- atau sebesar 98,43% .

IK 7 : Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LPTK (%)

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN adalah Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan perikanan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Perekrayasaan Teknologi Kelautan Tahun 2025, target IK ini adalah Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LPTK sebesar 80%. Adapaun capaian IK ini tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 11. Capaian Kinerja IK 7 pada Tahun 2025

SK-1		Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan							
IK-7		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LPTK (%)							
Realisasi Tahun 2021 - 2024				Target dan Realisasi Tahun 2025				Target Kinerja 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan Tahun 2024-2025	Target 2029	% Capaian
-	-	-	-	80	100	120,00%	3,66%	84	119,05%

Pada tahun 2025 capaian IK ini telah melebihi target yang ditetapkan, yakni Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LPTK sebesar 100% dari target 80%, atau dengan presentase capaian sebesar 120%. Capaian ini berdasarkan Nota Dinas Plt. Sekretaris BPPSDM Nomor 4214/BPPSDM.1/PL.760/XII/2025 tanggal 15 Desember 2025 perihal Capaian IKU “Tingkat Pengelolaan BMN Lingkup BPPSDMKP Tahun 2025.

IK ini merupakan IK baru yang ada di LPTK sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. capaian IK lebih tinggi apabila dibandingkan dengan capaian sesame UPT eks-riset kelautan yaitu Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP) yaitu sebesar 90%

Keberhasilan capaian IK ini adalah disebabkan diantaranya adalah kelengkapan dokumen yang mendukung aspek penilaian tingkat kepatuhan pengelolaan BMN dan setiap aspek dilakukan monitoring terhadap dokumen-dokumen secara berkala.

Kegiatan yang menunjang tercapainya IK ini diantaranya adalah kegiatan inventarisasi aset, pemeliharaan aset, pengajuan penghapusan aset serta pengajuan pelelangan aset. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian IK ini antara lain adalah Penyusunan RKBMN 2027, Penyusunan CaLK BMN, Usulan Penetapan Status Penggunaan BMN, Inventarisasi BMN serta Pengawasan dan Pengendalian BMN.

Dalam rangka mencapai IK ini semula telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- Namun demikian pada perjalanannya terdapat kebijakan

efisiensi yang menyebabkan terhapusnya alokasi anggaran tersebut, namun demikian hal ini tidak mengurangi kinerja dalam capaian IK tersebut.

IK 8 : Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja LPTK (Proposal)

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 7/2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Tahun 2025, target IK ini adalah Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja LPTK adalah sebanyak 1 (satu) buah Proposal. Adapun capaian IK ini tersaji dalam tabel tersebut:

Tabel 12. Capaian Kinerja IK 8 pada Tahun 2025

SK-1 Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan									
IK-8 Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja LPTK (Proposal)									
Realisasi Tahun 2021 - 2024				Target dan Realisasi Tahun 2025				Target Kinerja 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan Tahun 2024-2025	Target 2029	% Capaian
-	-	-	1	1	1	100,00%	3,66%	1	100,00%

Pada tahun 2025 capaian IK ini telah mencapai target yang ditetapkan, yakni Inovasi Pelayanan Publik yang ditetapkan pada unit kerja LPTK sebesar 1 dari target 1, atau dengan presentase capaian sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan Keputusan Kepala BPPSDM KP Nomor 57 Tahun 2025 tentang Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Bdan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.

Capaian IK ini sama apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu sebesar 1 proposal serta capaian IK tidak dapat dibandingkan dengan satker sejenis yaitu Loka Riset Kerentanan Sumber Daya Pesisir karena satker tersebut tidak mempunyai IK ini.

Keberhasilan capaian IK ini adalah tersusunnya proposal Inovasi Layanan Publik LPTK yaitu SIMARIBAJA yang merupakan bentuk layanan public yang dapat dimanfaatkan oleh nelayan pengguna WakatobiAIS.

Kegiatan yang menunjang tercapainya IK ini diantaranya adalah terjalinnya hubungan yang baik antara penyelenggara layanan public dengan para pihak yang menggunakan layanan public tersebut seperti nelayan, penyuluh, pelajar dan masyarakat umum.

Dalam rangka mencapai IK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.7.200.000,- dengan realisasi penyerapan tahun 2025 sebesar Rp. 6.829.000,- atau sebesar 98,85%.

IK 9 : Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LPTK (Nilai)

Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Tahun 2025, target IK ini adalah Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LPTK sebesar 80. Adapun capaian IK ini tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 13. Capaian Kinerja IK 9 pada Tahun 2025

SK-1 Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan									
IK-9 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LPTK (Nilai)									
Realisasi Tahun 2021 - 2024								Target Kinerja 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan Tahun 2024-2025	Target 2029	% Capaian
-	-	-	-	80	80	100,00%	#VALUE!	84	95,24%

Pada tahun 2025 capaian IK ini telah mencapai target yang ditetapkan, yakni Nilai Pengawasan kearsipan Internal LPTK (Nilai) sebesar 81,58% dari target 80%, atau dengan presentase capaian sebesar 101,98%. Capaian IK ini berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Umum Nomor 2021/SJ.6/TU.220/XI/2025 perihal Penyampaian Hasil Pengawasan Kearsipan Internal KKP tahun 2025 tanggal 21 November 2025. Indikator Kinerja ini merupakan IK baru di tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Faktor yang mendukung tercapainya IK ini diantaranya adalah sudah dilaksanakan menyesuaikan dengan peraturan terbaru Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9/PERMEN-KP/2021 tentang Kode Klasifikasi, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian IK ini antara lain adalah Penerimaan dan Pembuatan Arsip, Pemberkasan Arsip Aktif dan Melakukan Penataan Arsip Inaktif

Dalam rangka mencapai IK ini semula telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.7.500.000,- Namun demikian pada perjalanannya terdapat kebijakan efisiensi yang menyebabkan terhapusnya alokasi anggaran tersebut, namun demikian hal ini tidak mengurangi kinerja dalam capaian IK tersebut.

IK 10 : Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya LPTK (%)

Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya LPTK merupakan layanan yang dilaksanakan oleh LPTK dalam menjalankan dukungan manajerial yang meliputi laporan pelaksanaan kegiatan dari masing-masing rincian output antara lain:

1. Layanan BMN
2. Layanan Hubungan Masyarakat
3. Layanan Umum
4. Layanan Data dan Informasi
5. Layanan Perkantoran
6. Layanan Manajemen SDM
7. Layanan Perencanaan dan Penganggaran
8. Layanan Pemantauan dan Evaluasi
9. Layanan Manajemen Keuangan
10. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Tahun 2025, target IK ini adalah dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya LPTK sebesar 100%. Capaian IK ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14. Capaian Kinerja IK 10 pada Tahun 2025

SK-1 Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan									
IK-10 Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya LPTK (%)									
Realisasi Tahun 2021 - 2024				Target dan Realisasi Tahun 2025				Target Kinerja 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan Tahun 2024-2025	Target 2029	% Capaian
100	100	100	100	100	100	100,00%	0,00%	100	100,00%

Pada tahun 2025 capaian IK ini telah mencapai target yang ditetapkan, yakni persentase layanan dukungan manajemen internal LPTK sebesar 100% dari target 100%, atau dengan presentase capaian sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan bukti dukung yang telah dikumpulkan yakni tersedianya semua laporan pelaksanaan kegiatan dari masing-masing layanan tersebut pada tahun 2025 yang telah diupload pada tautan: https://drive.google.com/drive/folders/1SdqBm8wQ-pxlQUjQq4Y_orRDTTftPj4s?usp=drive_link

Capaian IK ini sama apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu sebesar 100% serta capaian IK sama apabila dibandingkan dengan capaian sesame UPT eks-riset kelautan yaitu Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP) yaitu sebesar 100%

Keberhasilan capaian IK ini adalah terjalannya komunikasi yang baik antara ketua tim kerja dengan penanggung jawab tiap-tiap layanan, adanya pemantauan dan evaluasi secara berkala, serta tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan Layanan Dukungan Manajemen internal Satker LPTK

Kegiatan yang menunjang tercapainya IK ini diantaranya adalah adanya inventarisasi dan pendokumentasian kegiatan yang telah dilaksanakan pada tiap-tiap layanan dukungan manajemen internal tersebut dengan baik sehingga mempermudah dalam penyusunan laporan tersebut.

Dalam rangka mencapai IK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.930.329.000,- dengan realisasi penyerapan tahun 2025 sebesar Rp. 928.461.404,- atau sebesar 94,85%

3.3. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2025

Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk minta keterangan akan pertanggungjawaban (LAN, 2003).

Kriteria Akuntabilitas keuangan adalah sebagai berikut : (1) Pertanggungjawaban dana publik; (2) Penyajian tepat waktu; (3) Adanya pemeriksaan (audit)/respon pemerintah. Pagu anggaran Tahun 2025 yang disediakan dalam rangka pembiayaan pelaksanaan kegiatan dan kinerja Loka Perekrutan Teknologi Kelautan (LPTK) awalnya adalah sebesar Rp. 4.403.513.000,- yang terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp. 1.313.513.000,- dan belanja barang sebesar Rp. 3.090.000.000,-. Dalam perjalanannya terjadi kebijakan efisiensi anggaran kemudian relaksasi efisiensi anggaran setelah itu penghapusan pagu blokir serta yang terakhir adalah adanya penambahan pagu belanja pegawai (ASN eksisting dan PPPK baru) sehingga pagu anggaran pada akhir tahun 2025 adalah sebesar Rp. 3.188.726.000,- yang terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp. 1.732.583.000,- dan belanja barang sebesar Rp. 1.456.143.000,- dengan total realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 3.157.428.452,- atau dengan persentase sebesar 99,02%. Persentase realisasi serapan anggaran tahun 2025 lebih tinggi apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni sebesar 94,26%. Adapun keterangan terkait perkembangan pagu dan realisasi anggaran tahun 2025 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 15. Histori Pagu Anggaran DIPA 2025 LPTK

NO	Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)				
		DIPA awal (Desember 2024)	DIPA Revisi Ke-1 (Februari 2025)	DIPA Revisi Ke- 2 s.d 3 (April s.d Oktober 2025)	DIPA Revisi Ke- 4 s.d 5 (September s.d Oktober 2025)	DIPA Revisi Ke-6 s.d 7 (November s.d Desember 2025)
1	Belanja Pegawai	1.313.513.000	1.313.513.000	1.313.513.000	1.313.513.000	1.732.583.000
2	Belanja Barang	3.090.000.000	3.090.000.000	3.090.000.000	1.456.143.000	1.456.143.000
3	Total Pagu	4.403.513.000	4.403.513.000	4.403.513.000	2.769.656.000	3.188.726.000
4	Pagu Blokir	134.346.000	1.666.257.000	1.633.857.000	-	-
5	Pagu Efektif	4.269.167.000	2.737.256.000	2.769.656.000	2.769.656.000	3.188.726.000

Tabel 16. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2025

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	(%)
1	Belanja Pegawai	1.732.583.000	1.711.666.167	98,79%
2	Belanja Barang	1.456.143.000	1.445.762.285	99,29%
Total		3.188.726.000	3.157.428.452	99,02%

Tabel 17. Perbandingan Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2023-2025

No	Jenis Belanja	2023			2024			2025		
		Pagu	Realisasi	(%)	Pagu	Realisasi	(%)	Pagu	Realisasi	(%)
1	Belanja Pegawai	1.222.499.000	1.152.325.957	94,26%	1.273.513.000	1.268.424.042	99,60%	1.732.583.000	1.711.666.167	98,79%
2	Belanja Barang	3.210.000.000	3.180.964.768	99,10%	3.110.000.000	2.957.799.480	95,11%	1.456.143.000	1.445.762.285	99,29%
Total		4.432.499.000	4.333.290.725	97,76%	4.383.513.000	4.226.223.522	96,41%	3.188.726.000	3.157.428.452	99,02%

Tabel 18. Pagu dan Realisasi Anggaran per Rincian Output (RO) Tahun 2025

RINCIAN OUTPUT		VOLUME	PAGU DIPA AWAL	PAGU DIPA AKHIR	REALISASI	(%)
1	2378.EBA.956 LAYANAN BMN	1 Layanan	10.000.000	-		#DIV/0!

2	2378.EBA.958 LAYANAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN INFORMASI	1 Layanan	20.000.000	5.300.000	5.299.000	99,98%
3	2378.EBA.962 LAYANAN UMUM	1 Layanan	60.000.000	32.031.000	31.675.781	98,89%
4	2378.EBA.963 LAYANAN DATA DAN INFORMASI	1 Layanan	7.500.000	1.900.000	1.530.000	80,53%
5	2378.EBA.994 LAYANAN PERKANTORAN	1 Layanan	4.183.513.000	3.148.895.000	3.118.323.671	99,03%
6	2378.EBC.954 LAYANAN MANAJEMEN SDM	9 Layanan	15.000.000	-		#DIV/0!
7	2378.EBD.952 LAYANAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	1 Layanan	30.000.000	-		#DIV/0!
8	2378.EBD.953 LAYANAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI	1 Layanan	35.000.000	-		#DIV/0!
9	2378.EBD.955 LAYANAN MANAJEMEN KEUANGAN	1 Layanan	35.000.000	600.000	600.000	100,00%
10	2378.EBD.974 LAYANAN PENYELENGGARAAN KEARSIPAN	1 Layanan	7.500.000	-		#DIV/0!
TOTAL			4.403.513.000	3.188.726.000	3.157.428.452	99,02%

Tabel 19. Pagu dan Realisasi Anggaran per Indikator Kinerja (IK) Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ALOKASI ANGGARAN AWAL	ALOKASI ANGGARAN AKHIR	REALISASI	(%)
---------	-------------------	--------	-----------------------	------------------------	-----------	-----

Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan LPTK	1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPTK (%)	85	35.000.000	600.000	600.000	100,00 %
	2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LPTK (Nilai)	92	11.474.000			#DIV/0!
	3	Penilaian Mandiri SAKIP LPTK (Nilai)	80	23.526.000			#DIV/0!
	4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LPTK (Nilai)	71,5	30.000.000			#DIV/0!
	5	Indeks Profesionalitas ASN LPTK (Indeks)	83	15.000.000	1.732.583.000	1.711.666.167	98,79%
	6	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LPTK (%)	80	1.921.619.000	518.014.000	509.871.881	98,43%
	7	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LPTK (%)	80	10.000.000			#DIV/0!
	8	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja LPTK (Proposal)	1	27.500.000	7.200.000	6.829.000	94,85%
	9	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LPTK (Nilai)	80	7.500.000			#DIV/0!
	10	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya LPTK (%)	100	2.321.894.000	930.329.000	928.461.404	99,80%
TOTAL				4.403.513.000	3.188.726.000	3.157.428.452	99,02%

Berdasarkan hasil capaian realisasi kinerja dan keuangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada periode Tahun 2025, Target Kinerja yang disepakati dalam dokumen Perjanjian Kinerja telah diakomodir dan didukung dengan ketersediaan anggaran serta dapat diserap dengan baik. Pengalokasian anggaran yang tepat dapat mendorong kinerja pencapaian output yang baik. Dalam perjalanannya tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rincian Kertas Kerja Satker pada Tahun 2025 telah mengalami beberapa kali revisi/penyesuaian yaitu sebagaimana berikut:

1. Revisi Ke-1 Nomor : SP DIPA – 032.12.2.403820/2025 tanggal 21 Februari 2025. Pada revisi tersebut LPTK mendapatkan efisiensi anggaran (pagu blokir) sebesar Rp. 1.666.257.700,- dari total pagu Rp. 4.403.513.000,- sehingga pagu efektif LPTK tahun 2025 pada revisi ke-1 tersebut adalah sebesar Rp. 2.737.256.000,-
2. Revisi Ke-2 Nomor : SP DIPA – 032.12.2.403820/2025 tanggal 9 April 2025. Pada revisi tersebut LPTK mendapatkan buka pagu blokir sebesar Rp. 32.400.000,- dari total pagu blokir Rp. 1.666.257.7000,- sehingga total pagu blokir menjadi Rp. 1.633.857.000,- sehingga pagu efektif LPTK tahun 2025 pada revisi ke-2 tersebut adalah sebesar Rp. 2.769.656.000,-.
3. Revisi Ke-3 SP DIPA – 032.12.2.403820/2025 tanggal 10 Juli 2025 Kode DS:4000-5108-0168-8764. Pada revisi tersebut adalah melakukan Revisi Halaman III DIPA. Tidak ada perubahan komposisi pagu anggaran;
4. Revisi Ke-4 Nomor : SP DIPA – 032.12.2.403820/2025 tanggal 1 September 2025 Kode DS:7098-0974-0411-5804. Pada revisi tersebut terjadi penghapusan seluruh pagu blokir sebesar Rp. 1.633.857.000,- sehingga pagu efektif LPTK tahun 2025 pada revisi tersebut adalah sebesar Rp. 2.769.656.000,-.
5. Revisi Ke-5 Nomor : SP DIPA – 032.12.2.403820/2025 tanggal 14 Oktober 2025 Kode DS:7098-0974-0411-5804. Pada revisi tersebut adalah melakukan revisi pemutakhiran serta halaman III DIPA sehingga tidak mengalami perubahan pagu
6. Revisi Ke-6 Nomor : SP DIPA – 032.12.2.403820/2025 tanggal 19 November 2025 Kode DS:1122-0948-6652-0288. Pada revisi tersebut adalah terjadi penambahan pagu pada belanja pegawai sebesar Rp sehingga pagu DIPA pada revisi tersebut adalah menjadi Rp. 3.188.726.000,-.
7. Revisi Ke-7 Nomor : SP DIPA – 032.12.2.403820/2025 tanggal 4 Desember 2025 Kode DS:1122-0948-6652-0288. Pada revisi tersebut adalah melakukan optimalisasi belanja agar penyerapan anggaran menjadi maksimal, tidak terjadi perubahan pagu DIPA.

b. Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya

A. Efisiensi Anggaran

LPTK sebagai organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan value for money dalam menjalankan aktivitasnya Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran (maximizing benefits and minimizing costs), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga disebutkan bahwa evaluasi kinerja anggaran terdiri atas evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi, evaluasi kinerja anggaran atas aspek manfaat dan evaluasi kinerja atas aspek konteks. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilaksanakan untuk kinerja anggaran tingkat eselon I/program dan tingkat satuan kerja/kegiatan. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel: capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan. Efisiensi terdiri atas

efisiensi keluaran (output) Program untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat unit Eselon I/program dan efisiensi keluaran (output) kegiatan untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat satuan kerja/kegiatan.

Dalam rangka penghitungan efisiensi data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi keluaran program dan efisiensi keluaran output kegiatan meliputi: data capaian keluaran program, data capaian keluaran kegiatan, pagu anggaran dan realisasi anggaran. Efisiensi dihitung dengan cara membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya. Efisiensi anggaran LPTK memperoleh skor 14,56. Efisiensi menunjukkan perolehan positif dari rentang nilai efisiensi +20 sampai dengan -20. Kondisi ini dipengaruhi atas penggunaan anggaran dengan realisasi anggaran sebesar 99,02% dengan capaian tingkat kinerja sebesar 107,97% sehingga pencapaian nilai efisiensi anggaran LPTK tahun 2025 sebesar 9,8 menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran pada LPTK di Tahun 2025 dinilai cukup efisien dan kegiatan telah berjalan dengan cukup baik, namun kondisi ini perlu mendapat perhatian dan pengawalan secara baik dalam rangka peningkatan kinerja dan konsistensi terhadap pelaksanaan kegiatan di periode berikutnya.

Secara ringkas efisiensi anggaran LPTK dapat disimpulkan sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 20. Efisiensi Anggaran LPTK Tahun 2025

Indikator Kinerja		Target IK	Capaian IK	Persentase Capaian	Pagu	Realisasi	%	Efisiensi
Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan LPTK								
1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPTK (%)	85	85	100,00	600.000	600.000	100,00	0,00

2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LPTK (Nilai)	92	96,49	104,88			#DIV/0!	#DIV/0!
3	Penilaian Mandiri SAKIP LPTK (Nilai)	80	81,2	101,50			#DIV/0!	#DIV/0!
4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LPTK (Nilai)	71,5	100	120,00			#DIV/0!	#DIV/0!
5	Indeks Profesionalitas ASN LPTK (Indeks)	83	90,36	108,87	1.732.583.000	1.711.666.167	98,79	10,07
6	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LPTK (%)	80	100	120,00	518.014.000	509.871.881	98,43	21,57
7	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LPTK (%)	80	100	120,00			#DIV/0!	#DIV/0!
8	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja LPTK (Proposal)	1	1	120,00	7.200.000	6.829.000	94,85	25,15
9	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LPTK (Nilai)	80	81,58	101,98			#DIV/0!	#DIV/0!
10	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya LPTK (%)	100	100	100,00	930.329.000	928.461.404	99,80	0,20
Total Anggaran dan Efisiensi LPTK tahun 2025				107,97	3.188.726.000	3.157.428.452	99,02	8,95

B. Alokasi Sumber Daya

Sumber daya ekonomi tidak hanya berupa sumber daya alam, tetapi juga sumber daya manusia, modal, serta wirausaha (entrepreneur). Alokasi sumber daya ekonomi berarti penentuan banyaknya jumlah sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan wirausaha yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang dan jasa. Manfaat mengetahui alokasi sumber daya ekonomi adalah menjadi bahan pertimbangan manusia dalam melakukan perencanaan kebijakan ekonomi terutama terkait penggunaan sumber daya alam. Modal berupa anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan untuk mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, disamping itu anggaran dipergunakan juga sebagai alat pengendalian untuk mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan.

Jumlah sumberdaya manusia LPTK sampai dengan Tahun 2025 adalah sebanyak 31 personil yang terdiri atas 21 Aparatur Sipil Negara (ASN), terdiri atas 10 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 11 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/PPPK (10 orang merupakan PPPK baru yang terangkat pada Oktober 2025), 1 orang PPPK Paruh Waktu dan 9 orang PJLP. Dari 21 ASN yang ada, 1 pegawai menduduki jabatan Struktural, 4 pegawai Jabatan Fungsional Tertentu serta 16 pegawai adalah Jabatan Fungsional Umum. Semua sumber daya manusia yang ada berkontribusi dalam pencapaian indikator kinerja yang telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan.

c. Pelaksanaan Kegiatan Positif Lainnya LPTK Tahun 2025

Loka Perencanaan Teknologi Kelautan selaku UPT ex riset yang masih menunggu hasil penataan organisasi, disamping menjalankan tugas/kegiatan manajerial, juga menjalankan beberapa kegiatan positif lainnya. Kegiatan tersebut dijalankan oleh LPTK pada tahun 2025 adalah berupa penyelenggaraan layanan public, penerimaan kunjungan tamu, kerjasama serta kegiatan kehumasan. Adapun ringkasan kegiatan positif tersebut antara lain:

1. Sosialisasi Materi Kelautan dan Perikanan untuk Pelajar

Tim layanan public LPTK melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah, dari mulai sekolah dasar, sekolah menengah pertama, serta sekolah menengah atas yang ada di Kabupaten Wakatobi khususnya di Pulau Wangi-Wangi. Dalam kunjungan tersebut, tim melakukan sosialisasi materi kelautan dan perikanan, khususnya terkait pengenalan ekosistem laut serta upaya pelestariannya. Hal ini dilakukan untuk menanamkan kesadaran menjaga laut pada pelajar sehingga diharapkan pelajar dapat lebih mencintai lingkungan.



Gambar 7. Sosialisasi Materi Kelautan dan Perikanan kepada Pelajar

2. Kunjungan Tamu

LPTK menerima kunjungan tamu dari berbagai macam pihak, seperti pelajar, mahasiswa, akademisi serta masyarakat umum lainnya. Dalam kunjungan tersebut LPTK biasanya menjelaskan kepada tamu tentang peralatan hasil riset yang telah dihasilkan oleh LPTK sebelumnya, seperti WakatobiAIS, WakatobiSeaBamboo serta lainnya. Tamu yang berkunjung akan disuguhkan terkait teknologi AIS Base Station yang dimiliki oleh LPTK yang berfungsi sebagai suplay data lalu lintas kapal pada aplikasi Marine Traffic, dan dijelaskan terkait lalu lintas kapal khususnya di areal perairan Sulawesi Tenggara.



Gambar 8. Kunjungan Tamu ke LPTK

3. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

LPTK juga menyelenggarakan forum konsultasi publik (FKP) sebanyak 2 kali pada tahun 2025, yakni pertama FKP pada 10 Juli 2025 dengan peserta dari nelayan pengguna WakatobiAIS, perwakilan Dinas Perikanan Kabupaten Wakatobi, Penyuluh Perikanan, AKKP Wakatobi serta dari Akademisi ITBM Wakatobi. Dalam forum tersebut dibahas terkait perkembangan penggunaan WakatobiAIS yang telah diserahkan kepada nelayan baik dari LPTK maupun dari Dinas Perikanan Wakatobi agar dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Pada FKP kedua, pada Desember 2025 LPTK mengundang perwakilan pelajar dari sekolah menengah atas yang ada di pulau Wangi-Wangi untuk berdiskusi bersama dengan Tema “Keterlibatan Generasi Muda dalam Penguatan Pelayanan Publik LPTK”





Gambar 9. Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik LPTK

4. Kegiatan Kehumasan Lainnya

LPTK juga melakukan kegiatan kehumasan lainnya, seperti melakukan kunjungan/berkoordinasi dengan Dinas Perikanan Kabupaten Wakatobi, Penyuluh Perikanan, Taman Nasional Wakatobi serta melakukan kunjungan kepada nelayan-nelayan pengguna WakatobiAIS untuk melakukan pendampingan.



Gambar 10. Penyelenggaraan Kegiatan Kehumasan Lainnya

BAB IV

PENUTUP

4.1. SIMPULAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

4.1. Simpulan Capaian Kinerja Organisasi

Pada Bab Akhir ini laporan ini kami simpulkan bahwa berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025 dengan menggunakan aplikasi Kinerjaku, pengukuran ini dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (key performance indicator/KPI) pada masing-masing perspektif secara keseluruhan kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Wakatobi termasuk baik, di mana Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tahun 2025 adalah sebesar 107,97% Nilai tersebut memang sedikit lebih rendah bila dibandingkan dengan NKO tahun 2024 yang bernilai sebesar 108,82%. Nilai Kinerja Organisasi tersebut diperoleh dari pengukuran 10 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Dari 10 IK tersebut, terdapat 3 IK yang status capaiannya istimewa (Persentase capaian >110%) serta 7 IK status capaiannya baik (Persentase Capaian 90-100%) yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya. Dari sisi akuntabilitas keuangan, realisasi anggaran LPTK pada Tahun 2025 sebesar Rp. 3.157.428.452,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 3.188.726.000,- atau persentase realisasi anggaran sebesar 99,02%. Persentase realisasi anggaran tahun ini lebih tinggi apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 96,41%. Dengan capaian tahun ini, diharapkan dapat ditingkatkan untuk tahun kedepannya, khususnya pada indikator kinerja yang mempunyai output kendali tinggi sehingga nilai NKO dapat maksimal serta realisasi anggaran baik dari belanja pegawai maupun belanja barang dapat terserap sesuai dengan rencana penarikan dana yang telah ditetapkan. Semua data dukung capaian indikator kinerja dalam laporan ini telah diunggah pada tautan: https://bit.ly/Daduk-IKU_LPTK_TW4_2025

Terkait dengan perkembangan penataan organisasi/UPT eks riset di lingkungan BPPSDMKP yang hingga kini masih belum selesai kami besar harapan agar segera ada kabar baik sehingga dapat meningkatkan semangat kinerja bagi segenap pegawai serta dapat memberikan sumbangsih/kontribusi nyata untuk masyarakat khususnya di bidang kelautan dan perikanan.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja 2025 Awal:



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bpsdm@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Aliruddin**

Jabatan : Plt. Kepala Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **Rudi Alek Wahyudin**

Jabatan : Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Januari 2025

Pihak Kedua
Sekretaris Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan


Rudi Alek Wahyudin

Pihak Kesatu
Plt. Kepala Loka Perekayasaan
Teknologi Kelautan



Aliruddin

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPTK (%)	85
		2.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LPTK (Nilai)	92
		3.	Penilaian Mandiri SAKIP LPTK (Nilai)	80
		4.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LPTK (Nilai)	71,5
		5.	Indeks Profesionalitas ASN LPTK (Indeks)	83
		6.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LPTK (%)	80
		7.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LPTK (%)	80
		8.	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja LPTK (Proposal)	1
		9.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LPTK (Nilai)	80
		10.	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya LPTK (%)	100

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	4.403.513.000
Total Anggaran Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Tahun 2025		4.403.513.000

Jakarta, 30 Januari 2025

Pihak Kedua
Sekretaris Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan


Rudi Alek Wahyudin

Pihak Kesatu
Plt. Kepala Loka Perekayasaan
Teknologi Kelautan


Aliruddin

Perjanjian Kinerja 2025 Perubahan:



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id SUREL brsdm@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Aliruddin**

Jabatan : Plt. Kepala Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Joni Haryadi D**

Jabatan : Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Joni Haryadi D

PIHAK PERTAMA
Plt. Kepala Loka Perekayasaan
Teknologi Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Aliruddin

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPTK (%)	85
		2.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LPTK (Nilai)	92
		3.	Penilaian Mandiri SAKIP LPTK (Nilai)	80
		4.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LPTK (Nilai)	71,5
		5.	Indeks Profesionalitas ASN LPTK (Indeks)	83
		6.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LPTK (%)	80
		7.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LPTK (%)	80
		8.	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja LPTK (Proposal)	1
		9.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LPTK (Nilai)	80
		10.	Persentase Dukungan Manajemen Teknis Kegiatan Strategis Lainnya LPTK (%)	100

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	3.188.726.000
TOTAL ANGGARAN LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN TAHUN 2025		3.188.726.000

Jakarta, 5 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Joni Haryadi D

PIHAK PERTAMA
Plt. Kepala Loka Perekayasaan
Teknologi Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Aliruddin

